

## Membaca Konflik Dan Relasi Kuasa Pada Masyarakat Menengah Religius-Industrialis : Studi Pembacaan Fenomena Konflik Versi Marx, Coser, Dan Dahrendorf

Muhammad Farhan<sup>1</sup>, Syamsul Arifin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang [230204210018@uin-student.ac.id](mailto:230204210018@uin-student.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang [syamsarifin@umm.ac.id](mailto:syamsarifin@umm.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

---

#### Keywords:

*The Middle Class Society;*  
*Religious;*  
*Industrialization;*

---

#### Article history:

*Received 2024-12-12*  
*Revised 2024-12-13*  
*Accepted 2024-12-16*

---

### ABSTRACT

*The middle class was born from the dichotomy of conflict between capitalists and workers. This middle class is faced with the fact that they are faced with vertical and horizontal class interests. On the one hand, they are faced with pressure from capitalist groups, while on the other hand, they are faced with proletarian class competition. In addition, the middle class is prone to stuttering transformation between the sacred (religion) and profane (industry) areas. This study reads a phenomenon of inequality in the transformation of a religious-industrial middle class group in Penampon Village, Pasuruan. This study aims to provide a theoretical interpretation of the social phenomena that occur. While as a practical goal, this study attempts to provide a scientific explanation to be used as reading material for the general public to become a reflective value. The type of data method used is observational and qualitative data description. Data sources were obtained through interviews with several informants. From this study, several conclusions were found, **First**, conflict must arise from interests, both vertical (bourgeois-proletarian) and horizontal (between bourgeois groups and between proletarians). **Second**, the religious-industrial middle class thinks about two separate latent problems, namely the problem of slow religious transformation and the rapid industrialization project. **Third**, the power can be born from the truth project. The truth project is latent and produced by the power holders who are based on their superior capital.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



---

#### Corresponding Author:

*Muhammad Farhan*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Malang; [230204210018@uin-student.ac.id](mailto:230204210018@uin-student.ac.id)*

---

### INFORMASI ARTIKEL

---

### ABSTRAK

---

**Kata Kunci:**

Masyarakat Kelas Menengah;  
Religius;  
Industrialisasi;

---

**Article history:**

Received 2024-12-12

Revised 2024-12-13

Accepted 2024-12-16

---

Masyarakat menengah lahir atas dikotomi konflik pemodal dan buruh. Kelas menengah inilah yang dihadapkan pada fakta bahwa mereka berhadapan pada kepentingan kelas vertikal dan horizontal. Dalam satu sisi mereka dihadapkan pada kondisi tekanan kelompok pemodal, sedang di sisi lain mereka berhadapan pada persaingan kelas proletarian. Selain itu kelompok menengah rentan terjadi gagap transformasi antara wilayah sakral (agama) dan profan (industri). Penelitian ini membaca sebuah fenomena ketimpangan transformasi tersebut pada sebuah kelompok masyarakat menengah religius-industrialis di Dusun Penampon Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan teoretis memberikan tafsiran atas fenomena sosial yang terjadi. Sedangkan sebagai tujuan praktis, penelitian ini berusaha memberikan penjabaran ilmiah untuk dipergunakan sebagai bacaan khalayak umum untuk menjadi nilai reflektif. Metode penggalan data yang digunakan adalah observatif dan penjabaran data secara kualitatif. Sumber data diperoleh dengan wawancara beberapa informan. Dari penelitian ini ditemukan beberapa simpulan, Pertama, konflik pasti lahir atas kepentingan, baik vertikal (borjuis-proletar) maupun secara horizontal (antar kelompok borjuis maupun antar proletarian). Kedua, masyarakat menengah religius-industrialis dihadapkan pada dua masalah laten yang terpisah, yakni persoalan transformasi agama yang melambat dan proyek industrialisasi yang cepat. Ketiga, kuasa bisa dilahirkan dari proyek kebenaran. Proyek kebenaran tersebut bersifat laten dan diproduksi oleh pemegang kekuasaan yang bersumber atas unggulnya modal.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



---

**Penulis Koresponden :**

Muhammad Farhan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; Malang; [230204210018@uin-student.ac.id](mailto:230204210018@uin-student.ac.id)

---

**1. PENDAHULUAN**

Konflik sosial adalah bagian dari fenomena alamiah (Tualeka 2017). Konflik lahir atas sebab interaksi manusia selalu memiliki kepentingan-kepentingan. Dalam teori-teori konflik klasik, tokoh-tokoh sosiologi secara garis besar membagi adanya pemisahan kepentingan, yakni kelompok pemodal dan kelompok buruh (proletarian). Dari segmentasi itu melahirkan konflik yang kian berkembang dan model-model yang baru, seperti yang dikemukakan para sosiolog pasca Marx. Konflik selalu berkembang atas sebab fenomena sosial juga berkembang.

Menyoal dua segmentasi kelompok tersebut, Dahrendorf salah seorang sosiolog modern menurut jika perjumpaan kelompok pemodal dan buruh justru melahirkan kelas baru. kelas tersebut adalah kelompok masyarakat menengah, yang memiliki dua kepentingan laten pada dua kelompok lainnya (Zulfiani, Farhana, and Oktavianingrum 2022). Kelas menengah inilah yang dihadapkan pada fakta bahwa mereka berhadapan pada kepentingan kelas vertikal dan horizontal. Dalam satu sisi mereka dihadapkan pada kondisi tekanan kelompok pemodal, sedang di sisi lain mereka berhadapan pada persaingan kelas proletarian.

Fenomena itu peneliti temui dalam satu kelompok masyarakat menengah di sebuah dusun yang dilingkupi industrialisasi besar. Dusun tersebut ialah Penampon kelurahan Wonokoyo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan. Kelompok menengah di dusun ini dalam proses reaktif- adaptif dengan adanya proses transformasi industrialisasi. Sebagai masyarakat tradisionalis pada mulanya, solidaritas mekanik mereka dikuatkan atas dasar penyebaran pemerataan pekerjaan dalam bidang pertanian dan juga sakralitas agama. Namun, kala proyek industrialisasi besar datang, dusun Penampon yang masuk dalam lingkup Desa Wonokoyo Beji, Kabupaten Pasuruan juga turut serta merasakan dampaknya.

Transformasi itu mengalami ketimpangan. Kemajuan masyarakat industri yang dicanangkan sebagai label menjanjikan, justru memicu polemik. Polemik konflik itu mungkin tidak lagi berwujud fisik. Namun seiring berjalannya waktu dan industrialisasi yang datang secara massif, ketimpangan antara ranah sakral (agama) dan profan (industri) justru berjalan tidak seimbang. Masyarakat dihadapkan pada dua kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan kolektif sebagai kebutuhan pertahanan simbol keagamaan, sedangkan kepentingan kedua bersifat individualis sebagai mekanisme pertahanan hidup. Penelitian ini hendak memberikan tafsiran dan pemaknaan pada fenomena tersebut dengan pendekatan teori konflik dan model relasi kuasa. Hal ini tentu penting dilakukan, mengingat ketimpangan yang demikian adalah fenomena yang berulang dan bisa saja menjadi topik besar pada transformasi masyarakat agama-industri di masa mendatang.

Penelitian ini telah beberapa kali diulas, yakni menyoal fenomena konflik sosial yang kemudian dinarasikan pada teori konflik yang ada. selain itu ada juga penelitian yang telah membahas teori konflik dengan model kepustakaan, yakni komparatif dan analisis. Beberapa penelitian itu seperti berikut ; Yayang Nuraini (dkk) dengan judul "Relevansi Teori Karl Marx dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0" (Zulfiani et al. 2022), Ali Mursyid Azizi dengan judul

“Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung dan Lewis A. Coser” (Azisi 2021), Elvira Valentine dengan judul Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx (Valentine et al. 2023), Julia Eleazer dengan judul Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia (Nendissa 2022). Dari pembacaan tersebut, penelitian ini mencoba menggabungkan dua penelitian-penelitian sebelumnya yakni membaca sebuah fenomena konflik sosial yang berkebaruan dan memberikan pemaknaan pada teori konflik dari berbagai model.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-observatif. Menggunakan cara pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara. Beberapa informan didapatkan secara random sampling dengan pemerataan segmentasi (pemuka agama, buruh tani, buruh pabrik, pemuda, golongan tua). Hasil wawancara oleh peneliti olah dan dianalisis, yang kemudian diberikan pemaknaan-pemaknaan sesuai konteks alur penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni teoretis dan praaktis. Sebagai tujuan teoretis, penelitian ini bertujuan memberikan tafsiran atas fenomena sosial yang terjadi. Sedangkan sebagai tujuan praktis, penelitian ini berusaha memberikan penjabaran ilmiah untuk dipergunakan sebagai bacaan khalayak umum untuk menjadi nilai reflektif. Sumber penelitian ini dari hasil wawancara, dan sumber sekunder diperkuat dengan jurnal ilmiah, buku, sekaligus data actual dari media massa.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dusun Penampon merupakan satu bagian dari Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Setelah bertahun-tahun konsisten masuk lima besar wilayah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur, proyek industrialisasi di Pasuruan terus meningkat. Proyek itu menyasar ke semua wilayah bahkan hingga desa-desa yang tidak dalam sepanjang jalur provinsi sekalipun. Dusun penampon menjadi salah satunya. Beberapa pabrik baru sudah masuk sejak 2010. Bahkan beberapa pabrik-pabrik tua sebelumnya juga sudah sampai pada tangan kedua dan ketiga pada pemilik setelahnya.

Dusun ini memiliki lanskap wilayah yang didominasi persawahan. Namun mata pencaharian petani tidak menempati urutan pertama. Rata-rata lahan sawah di dusun ini adalah sawah mati dan ditumbuhi tumbuhan liar untuk ternak. Sedangkan sawah yang aktif tidak begitu banyak, dan sudah beralih ke sistem bagi hasil. Beberapa pemilik lahan juga mengupah buruh tani untuk proses keberlanjutan. Para buruh tani pun juga tidak lagi diminati kalangan muda. Selain proses keberlanjutan tanah, alasan lain yang mendasar adalah kesejahteraan kaum tua yang masih ingin bekerja. Menjadi buruh tani adalah jalan satu-satunya dan masih menjanjikan untuk standar hidup mereka.

### 3.1 Agama dan Solidaritas Mekanik

Seperti pada kebanyakan di wilayah lain, agama juga menjadi satu objek sentral di sini. Kondisi masyarakat yang tergolong kelas menengah ke bawah, masih tidak bisa lepas dari persoalan ritus keagamaan. Hal itu diperkuat dengan hadirnya organisasi masyarakat (ormas) yang menjadi wadahnya. Dusun ini ditempati dua kelompok ormas dengan masing-masing memiliki jumlah jamaah yang terbilang tidak seimbang. Walau demikian, kekuatan dua basis keormasan ini tetaplah kuat, dibuktikan dengan adanya dua tempat ibadah (masjid dan *langgar*) yang saling berdekatan.

Dalam statistik secara garis besar jamaah Muhammadiyah mendominasi separuh lebih dalam sebaran penduduk dusun. Jumlah tersebut semakin bertambah seiring dengan populasi yang juga bertambah. Sedangkan jamaah Nahdliyyin mendiami *langgar* kecil yang dihuni oleh beberapa kepala keluarga saja. Ketimpangan dalam hal jumlah ini memang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, bahkan dari para pendahulu dusun.

Ketimpangan dalam hal jumlah tersebut pastilah melahirkan polemik yang berkepanjangan, baik yang nampak maupun laten. Seperti halnya di banyak tempat, masyarakat tradisional masih cenderung menjadikan agama sebagai sekumpulan instrumen yang paten dan memiliki nilai mengikat. Dengan begitu, pemahaman agama yang demikian melahirkan solidaritas yang menguat dan bersifat komunal. Persoalan-persoalan polemic tentu tidak jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan instrumen *ubudiyah* (ritus). Dan sifat polemik yang demikian juga tematis dan momentum. Sebut saja seperti persoalan perbedaan perayaan hari raya, tradisi tahlil kematian, perbedaan model walimah, serta persoalan lainnya.

Polemik yang terjadi sebetulnya tidaklah nampak secara fisik. Hal itu atas sebab penyelesaian konflik dari generasi-generasi sebelumnya yang berhasil dilakukan dan berulang hingga saat ini. Namun, segregasi sosial tidak begitu saja mudah untuk dihilangkan. Sebaran dua ormas yang menghuni satu wilayah seperti yang terjadi di sini justru kian menguat ketika para generasi tua mulai mencari pewaris estafet penerus. Agama telah bertransformasi menjadi kepentingan kekuasaan yang bergerak secara laten. Hal itu terbukti dengan hadirnya dua kelembagaan sebagai bawahan dari otoritas masjid dan *langgar* untuk memperkuat identitas generasi-generasi selanjutnya. Dari pihak Muhammadiyah dengan dominasinya yang kuat telah mendirikan asrama dan juga sekolah taman kanak-kanak. Sedangkan di sisi lain, kelompok *nahdliyyin* juga mendirikan beberapa majelis untuk melatih bakat minat pemuda-pemuda, seperti halnya majelis hadrah.

Dengan sebab yang demikian secara tidak langsung model solidaritas mekanik masih terus dipertahankan. Masyarakat dusun di sini tidak begitu menyukai pembagian pemerataan tugas yang jelas. Artinya persoalan agama, kemasjidan, hingga persoalan polemik pun mereka turut ambil bagian. Hal itu juga dikarenakan minimnya tokoh berpengaruh yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang mentereng. Hemat penulis, dua kelompok keormasan di sini sama-sama tidak memiliki tokoh agama (*ustadz*) yang *masyhur*. Dengan kesamaan latar belakang demikian, tentu tidak ada bentuk-bentuk polemik yang sentralistik pada perorangan atau antar tokoh. Semua dipukul rata dengan konflik-konflik tematis sesuai momentum yang berpusat dari isu-isu dari luar.

### ***3.2 Proyek Industrialiasi***

Dusun ini tengah berhadapan dengan kepentingan industrialisasi besar-besaran. Sejak lahirnya PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) Bersama dengan SIEB dan SIER, pabrik-pabrik mulai mendapat kemudahan perizinan (Agustini and Winarni 2014). Kebijakan itu bahkan sudah mulai dicanangkan mulai 1989 dengan pembebasan lahan yang dipanitiai oleh pemerintah daerah masing-masing (Agustini and Winarni 2014). Dengan kemudahan akses dan semangat kemajuan tersebut, pabrik-pabrik berdiri dan merubah lanskap persawahan menjadi tempat-tempat produksi. Dampak ini tentu merembet hingga wilayah-wilayah yang tidak dicanangkan awalnya, termasuk wilayah wonokoyo yang didiami dusun ini. Hingga

kini, tercatat beberapa brand besar memiliki terminal produksi di sini, seperti ABC, Behastex, HIT, dan brand-brand lainnya.

Namun, walau banyak industri berdiri, polemik sempitnya lapangan kerja masih menjadi rahasia umum. Berdasarkan fakta lapangan, di tahun 2022, dua pabrik besar mengalami pailit dan menjatuhkan PHK masal. Dua perusahaan itu adalah PT Karyamitra Budi Sentosa dengan total kepailitan 800 milyar (Jannah 2023), dan PT Agel Langgeng yang tutup total setelah demo besar selama empat tahun atas tunggakan gaji karyawan (Herfiana 2024).

Kendati demikian, polemik persoalan lapangan kerja tidak hanya berputar soal PHK. Masalah-masalah baru muncul yakni mulai maraknya gelombang pendatang yang mendominasi kuota penerimaan buruh. Perjumpaan saya dengan (IR, 30 tahun) salah seorang pemuda dusun yang juga bekerja menjadi buruh menuturkan jika gelombang pendatang hadir atas sebab adanya kuota besar-besaran di banding penduduk lokal. Menurut penuturannya (IR), pabrik memiliki siasat untuk menghindari polemik terhadap warga lokal, dengan cara memberikan ruang yang lebih banyak bagi pendatang untuk bisa diterima sebagai buruh daripada warga lokal. Alasan para HR pabrik memilih pendatang karena diyakini etos mereka lebih tinggi dan tidak rentan terhadap benturan kepentingan. Hal itu disebabkan pabrik-pabrik enggan bersinggungan banyak hal dengan penduduk lokal yang notabene berkuasa soal kebudayaan, adat istiadat, terlebih soal tanah tempat tinggal mereka. Singgungan itu yang nantinya riskan melahirkan gelombang pemberontakan seperti halnya unjuk rasa, baik persoalan upah maupun beban kerja.

Penuturan itu menguatkan asumsi saya kala melihat regulasi antara penerimaan buruh dan PHK masal cukup sering terjadi. Ironi itu ditambah lagi dengan keberadaan investor pemodal pemilik pabrik-pabrik itu bukanlah penduduk asli wilayah ini, bahkan pernyataan buruh-buruh yang saya kenali juga tidak mengenal pemilik utama perusahaan mereka bekerja. Yang demikian terjadi sebetulnya bukanlah polemik regional saja. Bahkan jika diusut pendirian industri-industri ini bisa meluas menuju tingkat kabupaten sekalipun.

Selanjutnya persoalan regulasi PHK atas dampak siasat industri menekan upah jauh dari UMK. Regulasi usia dan kualifikasi penerimaan buruh yang berubah-ubah membuat beberapa industri memutus kontrak kerja secara mendadak. Setelah itu pembukaan lapangan kerja bagi angkatan muda kembali dilakukan dengan dalih optimalisasi tenaga kerja muda. Regulasi yang singkat dan instan ini tentu saja memunculkan konflik baru bagi kalangan kelas buruh. Hal ini saya jumpai dengan pernyataan lain (MM 38 tahun) yang menjelaskan

bahwa pilihan sulit sering terjadi bagi kalangan buruh yang mendekati perpanjangan kontrak. Peralnya, pabrik seringkali membuka rekrutmen pekerja angkatan baru dalam regulasi waktu yang tidak pasti. Seringnya, dampak penerimaan pekerja baru ini menjadikan pemangkasan buruh yang dianggap sudah tidak masuk dalam kualifikasi (barometer tenaga dan usia). Maka penuturan (MM) selanjutnya menunjukkan pada saya bahwa lumrah terjadi adanya persaingan untuk membangung relasi dengan atasan atau pengawas buruh. Karena hal itu mampu menentukan nasib perpanjangan kontrak dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Proyek industrialisasi yang dicanangkan bakal membawa dampak positif, nyatanya juga tidak berbicara banyak. Lapangan kerja yang dijanjikan menjadi jawaban dari angkatan muda justru juga menuai banyak kontroversi. Walau demikian, mungkin jika dilihat dari sisi lain, pabrik-pabrik yang berdiri memang berhasil memberi ruang yang luas untuk masyarakat bertransformasi kemajuan. Beberapa sekolah menengah kejuruan juga dibanjiri pendaftar setiap tahunnya, semua atas dalih kebutuhan kualifikasi kerja yang layak. Masyarakat dusun mulai melek akan perhatian pada pendidikan setidaknya sampai menamatkan ijazah sekolah menengah atas.

### **3.3 Analisis Fenomena Dengan Teori Konflik (Marx, Lewis Coser, dan Dahrendorf**

Model penjelasan skema konflik di era klasik tetap menjadi landasan awal pembacaan fenomena ini. Pernyataan Marx tentang adanya kelas sosial benar alamiah terjadi. Walau ia hanya membagi atas dua segmen antara pemodal (borjuis) dan buruh (proletar), fenomena masyarakat kelas menengah tetaplah masuk dalam kelompok yang kedua. Bahkan dalam pandangan Marx kelas sosial justru hadir atas kesadaran kolektif (subjektif) bahwa sistem bekerja memang secara objektif (Valentine et al. 2023). Dengan begitu masyarakat menengah Dusun Penampon tetaplah masuk dalam kategori proletarian. Secara tidak langsung mereka meyakini jika proyek industrialisasi adalah kebutuhan penting untuk keberlangsungan hidup mereka. Gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa, pernyataan kelas sosial lahir atas kesadaran kolektif yang dibawa Marx telah terbantahkan. Dalam kasus ini masyarakat justru menjadikan kelas sebagai kemapanan. Tidak ditemukannya kesadaran-kesadaran kolektif yang memicu pemberontakan kelas. Sebaliknya, kelas sosial hadir secara alami dan menstrukturalkan kelas.



Pembacaan konflik selanjutnya adalah kritik Lewis Coser atas idealis Marxian setelah melihat apa yang dilakukan para kelompok structural-fungsionalis. Nyatanya konflik memang dibutuhkan untuk keberlangsungan perubahan sosial (Tualeka 2017). Hal itulah yang dimaksud oleh para structural-fungsionalis sebagai titik ekuilibrium. Dari landasan inilah Coser sering disebut sebagai pelopor fungsionalisme konflik (Azisi 2021). Dalam pandangan Coser juga, ia hendak menguatkan jika tidak selamanya konflik selalu alamiah. Bahkan jika perlu ia harus diciptakan untuk melahirkan resiliensi sebagai perubahan sosial. Artinya, bentuk konflik juga bisa berwujud horizontal berupa konflik dengan kelompok lain atau individu lain untuk penguatas identitas (Tualeka 2017), perekat sosial, serta munculnya solidaritas yang menguat (Azisi 2021). Bagi Coser, usaha mengeliminasi konflik dalam masyarakat bisa dipastikan adalah kesia-siaan, konflik adalah bagian kehidupan manusia, seperti halnya kerja sama (Outhwaite 2008). Karena ia (konflik) adalah komponen dasar dari sebuah asosiasi manusia.

Dalam fenomena yang terjadi ini, pernyataan teoritis Lewis Coser bisa dijelaskan pada dua titik. *Pertama*, adalah konflik persaingan antar kelompok borjuasi. Mereka bersaing menguatkan modal baik fisik (uang) maupun non fisik (regulasi pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal) untuk mengantongi izin. *Kedua*, adalah konflik persaingan kelas menengah. Konflik kelas menengah yang terjadi justru pada dua kepentingan, yakni kepentingan untuk memperoleh eksistensi individu pada kasus perebutan lapangan kerja, dan konflik kepentingan kelompok pada kasus perebutan pengaruh dominasi keormasan.

Selanjutnya gambaran konflik dalam versi Dahrendorf justru melahirkan pemahaman baru. Dahrendorf menggagas jika kemelut kelas proletarian justru melahirkan kelompok baru. Ia juga mengkritik Marx bahwa setiap individu tidak lepas dari kepentingan kelas. Dikotomi kelas pastilah didahului adanya kepentingan kelas (Nendissa 2022). Kepentingan-kepentingan itulah yang akan menghadirkan kelompok tengah, yang mana ia bisa bertransmisi membela pemodal maupun buruh. Bagi Dahrendorf setiap asosiasi selalu sarat akan konflik, konflik yang dimaksud lebih pada sifat manifes atau laten (Zulfiani et al. 2022). Dahrendorf mempertegas jika individu memiliki dua wajah (konflik dan consensus)(Zulfiani et al. 2022), oleh karenanya teori sosiologi tidak boleh pincang menafsiri.

Gagasan Dahrendorf ini sejalan dengan penggambaran adanya kemelut dalam kelas buruh untuk memperoleh lapangan kerja pada fenomena ini. Dari kondisi tersebut seperti penuturan salah satu narasumber di atas, PHK terjadi dengan seleksi dari para petinggi

pabrik. Ia menurut jika kegagalan membangun kepercayaan dan integritas akan menjadi ancaman masuk dalam kelompok yang tereliminasi. Dengan fakta demikian, secara tidak langsung seorang individu kelas proletar dituntut memiliki siasat cerdas untuk tanggap terhadap segala kondisi. Dan yang perludigarisbawahi dari gagasan ini, Dahrendorf ingin menunjukkan jika populasi manusia selalu didominasi oleh proletarian, dan hal alamiah terjadi.

Dari penjelasan ketiga model konflik yang dijabarkan di atas, konflik yang dimaknai sebagai kepentingan pastilah memiliki muatan nilai. Keterpengaruhannya itu terjadi antara eksternalisasi nilai dan justifikasi internalisasi nilai diproduksi oleh kelompok yang berkuasa. Melengkapi analisis tentang pembacaan konflik pada fenomena yang diteliti ini, perlu kiranya menjabarkan tentang hakikat dari muatan konflik itu sendiri, yakni kuasa. Dalam menyoal kuasa, Michael Foucault sering menjadi tokoh sentral yang mendeklarasikan tentang arkeologi pengetahuan. Walau ia lebih dikenal sebagai filosof, namun ia menyasar banyak wilayah, lebih-lebih pada ilmu sosial dan sejarah. Metodologi arkeologisnya berusaha melacak elemen pembentuk kebenaran dengan menyelidiki peristiwa diskursif (Syafiuddin 2018). Bagi Foucault segala pengetahuan selalu memiliki nilai dan kepentingan pihak yang berkuasa. Dengan demikian kekuasaan menurut Foucault tidaklah berdimensi ontologis, ia adalah piranti strategi yang bisa digunakan untuk kepentingan tertentu (Siregar 2021).

Metodologi Foucault selalu mengkritik dan mempertanyakan ulang bagaimana sebuah pengetahuan itu dilahirkan. Pengistilahannya dikenal dengan *episteme* yang sering digaungkan untuk menolak kebenaran absolut. Walau demikian Foucault juga mengaburkan pemahaman pembaca, ia juga tegas menjelaskan jika tidak serta-merka kekuasaan selalu berpusat seseorang atau intuisi (Adlin 2016). Baginya kekuasaan tidaklah berhenti pada instrument yang statis. Kekuasaan selalu menyebar dalam luasnya tatanan masyarakat, ia tidaklah repressif namun produktif. (Adlin 2016).

Fenomena masyarakat relasi kapitalis dan masyarakat religius-industrialis di atas juga menyimpan produksi-produksi kebenaran. Pertama, polemik laten yang terjadi antara para pemilik modal industrial melahirkan satu gagasan kebenaran yang diresepsi para kaum menengah. Penetapan UMK serta kelonggaran kebijakan seakan-akan memberikan satu nafas segar tentang harapan hidup yang layak. Dengan demikian muncul tafsir-tafsir bahwa kemapanan ideal adalah persoalan UMK dan bekerja di balik mesin-mesin industri. Padahal proyek kebenaran tersebut juga menyimpan ancaman yang tersembunyi. Ancaman limbah,

PHK masal, kepailitan, tunggakan gaji menjadi dampak yang tertutupi oleh proyek-proyek keamanan tersebut. Hal itu juga diperkeruh dengan banyaknya kasus pendirian pabrik baru dan pembebasan lahan yang kian bermunculan. Industrialisasi menjadi satu fragmen kemajuan yang diterima mentah-mentah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Relasi kuasa vertikal yang dibangun kelompok pemodal ternyata tidak begitu cepat menyadarkan solidaritas masyarakat menengah. Sebaliknya, kepentingan masyarakat menengah masih berputar dalam lingkup gagalnya transformasi segala ritus keagamaan mengimbangi kemajuan industrialisasi. Persoalan-persoalan pertukaran kebenaran antar kelompok ormas masih menjadi topik utama. Solidaritas mekanik masih menjadi kepentingan utama jika menyoal pertarungan kebenaran. Pembangunan instrumen fisik keagamaan masih menjadi satu hambatan kesadaran kolektif tersebut. Hal itu tercermin seperti kelompok Muhammadiyah membangun sekolah, mejelis, dan asrama. Sedangkan para pemangku NU melakukan kaderisasi kegiatan kepemudaan. Tema-tema berebut solidaritas keormasan masih menjadi kebutuhan utama dibanding memproyeksikan kebenaran baru soal keamanan-keamanan dan ancaman dari industrialisasi yang mereka terima.

Pada akhirnya masyarakat menengah yang demikian masih dihadapkan pada dua hal yang terpisah, persoalan wilayah sakral dan profan yang tidak kunjung selesai. Agama masih belum mampu membangun solidaritas organik yang mentransformasi masyarakat seimbang dalam menakar kepentingan. Sedangkan di sisi lain, industrialisasi menjadi proyek besar yang bergerak cepat atas keunggulan-keunggulan modal (sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik). Dengan demikian konflik muncul justru tidak hanya bergaris vertikal, melainkan juga horizontal. Konflik horizontal itulah yang menyibukkan kelompok kelas menengah saling berebut kuasa pengaruh satu dan yang lainnya, melupakan akan bahaya laten ancaman para kelompok kapital di atasnya. Bagan berikut kiranya memperjelas bagaimana skema konflik dalam versi Marx, Coser, maupun Dahrendorf bekerja menjelaskan fenomena penelitian ini.

#### **4. KESIMPULAN**

Fenomena selalu berubah seiring dengan berjalannya populasi manusia. Namun pembacaan ini telah menemukan beberapa kesimpulan penting dalam beberapa poin berikut.

Pertama, konflik pasti lahir atas kepentingan, baik kepentingan vertikal (borjuis-proletar) maupun horizontal (borjuis-borjuis, dan proletary-proletar). Kedua, masyarakat menengah religius-industrialis (Dusun Penampon Wonokoyo Beji Pasuruan) seringkali dihadapkan pada dua masalah yang terpisah yakni persoalan transformasi agama yang melambat dan proyek industrialisasi yang cepat. Ketiga, proyek kebenaran bersifat laten dan diproduksi oleh pemegang kekuasaan yang bersumber atas unggulnya modal. Penelitian lapangan fenomenologis bisa melahirkan tafsiran-tafsiran mikro sosiologis. Dengan demikian, penelitian ini tentunya memiliki celah dan kekurangan. Celah itu bisa berupa pengamatan yang kurang menyeluruh, dan sempitnya teori yang dipakai dalam mengupas fenomena. Selain atas nilai praktis teori yang berlingkup sempit, juga perlu dilakukan pengujian ulang hasil ini pada wilayah lain guna mendapatkan kritik dan penyempurnaan teoretis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlin, Alfathri. 2016. "Michel Foucault : Kuasa Pengetahuan, Rezim Kebenaran, Parrhesia." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 13-26.
- Agustini, Tita, and Retno Winarni. 2014. "Industrialisasi Di Kabupaten Pasuruan Tahun 1992-2007 (A Case Study Of Pasuruan Industrial Estate Rembang)." *Publika Budaya* 2.
- Azisi, Ali Mursyid. 2021. "Studi Komparatif Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis A. Coser." 07(02).
- Herfiana, Sarah. 2024. "Sudah Alami Kerugian 4 Tahun! Pabrik Permen Dan Biskuit Berusia 32 Tahun Kebanggaan Jawa Timur Ini Resmi Pailit." *Jatim Network*.
- Hidayat, Y., Nur, R., Nurdiyana, T., & Suharnanik, S. (2024). Corporate Culture, Transformational Charismatic Leadership and Cooperative Performance: Lessons from Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(4), 462-471.
- Hidayat, Y., Nur, R., & Nurdiyana, T. (2024). Urgency of Social Capital to Improve the Resilience of Independent Oil Palm Farmers in Managing Oil Palm Plantations in Peat Areas: Lessons from Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e05103-e05103.
- Jannah, Nahria Sakinatul. 2023. "Berdiri 35 Tahun! Perusahaan Sepatu Terbesar Di Jawa Timur Bangkrut Usai Terlilit Hutang Rp800 M? Bukan Malang." *Jatim Network*.

- Nendissa, Julia Eleazer. 2022. "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia." *Jurnal Pendidikan Soosiologi Universitas Pendidikan Ganesha* 4:69-76.
- Nur, R., Hidayat, Y., & Azis, F. (2022). Eksistensi Modal Sosial Petani Sawit Di Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2).
- Outhwaite, William. 2008. "Penyaluran Konflik." P. 1096 in *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern (The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, Mangihut. 2021. "Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1-12.
- Syafiuddin, Arif. 2018. "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18(2):14:141-55.
- Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 32-48.
- Valentine, Elvira, Marchell Nabil Muhamad, Mochamad Ikhsan, and Nur Hakim. 2023. "Konflik Pulau Rempang Dalam Perspektif Teori Kelas Karl Marx." *Das Sollen* (2023):1-17. doi: 10.11111/dassollen.xxxxxxx.
- Zulfiani, Yayang Nuraini, Nurul Farhana, and Wilda Oktavianingrum. 2022. "Relevansi Teori Karl Marx Dan Ralf Dahrendorf Dalam Implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Sebagai Alat Perwujudan Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Dialektika Hukum* 4(1):39-57.